

Melek Politik (*Political Literacy*) Pemilih Pemula Pada Pemilukada Serentak 15 Februari 2017 Di kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada Sma/Smk Negeri Se Kota Lhokseumawe)

Novi Quintena Rahayu¹, Juanda², Erna Yusnianti³
Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Lhokseumawe
Jln. B. Aceh Medan Km. 280 Buketrata 24301

¹noviquintenarahayu@yahoo.co.id, ²juanda@pnl.ac.id, ³erna_yusniyanti@yahoo.com

Abstrak - Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem demokrasi, dimana rakyat memiliki peran penting dalam urusan negara. Salah satu karakteristik yang menandai sistem politik demokrasi adalah adanya partisipasi politik yang berkualitas, yaitu dengan pemberian suara secara cerdas oleh warga negara dalam pelaksanaan pemilu maupun pemilukada. Hal tersebut terutama terjadi di kalangan pemilih pemula siswa SLTA yang merupakan kelompok warga negara muda yang baru pertama kali mengikuti pemilihan Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif analitis. Adapun tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai "Melek Politik (*Political Literacy*) Pemilih Pemula Dikota Lhokseumawe. Dari studi akan dihasilkan suatu bahan kajian dan konsep-konsep yang menyangkut tentang kemelekkan politik pemilih pemula dikota Lhokseumawe, dimana sebagai objek dari studi ini adalah para siswa/i sekota Lhokseumawe yang sudah berusia 17 tahun. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Tingkat melek politik (*political literacy*) Pemilih Pemula di Kota Lhokseumawe tergolong tinggi, dibuktikan dengan beberapa indikator, seperti kesadaran politik terhadap penentuan pilihan parpol/caleg dan kandidat yang bersaing dalam pemilu, Jenis media yang paling berpengaruh terhadap peningkatan *political literacy* adalah surat kabar, internet dan televisi, sedangkan parpol dan tim kampanye kandidat belum mampu menjalankan peran dengan baik dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya untuk pemilih pemula, Tingginya tingkat melek politik Pemilih Pemula di Kota Lhokseumawe tidak menjadi faktor pendorong bagi peningkatan partisipasi politik warga, terbukti tingkat partisipasi pemilih Pemula untuk golput di Kota Lhokseumawe cukup signifikan.

Kata kunci — Melek Politik, Pemilih Pemula

Abstrac - Indonesia is a country that uses a democratic system, where people have an important role in state affairs. One characteristic that marks the political system of democracy is the existence of quality political participation, namely by voting intelligently by citizens in the conduct of elections and post-conflict local elections. This is especially true among first-time high school student voters who are a group of young citizens who are participating for the first time in the election. The approach in this study is qualitative. The method used in this study is descriptive analytical qualitative method. The general objective to be achieved in this research is to get an idea of "Political Literacy" of Beginner Voters in Lhokseumawe City. From the study there will be a study material and concepts concerning the political elites of the beginner voters in the city of Lhokeumawe, where as the object of this study are the 17-year-old Lhokseumawe city students. From the results of the study it was concluded that the political literacy of Beginner Voters in Lhokseumawe City was high, as evidenced by several indicators, such as political awareness of the choice of political parties / candidates and candidates competing in elections. are newspapers, internet and television, while political parties and candidate campaign teams have not been able to play a good role in carrying out political education for the community, especially for novice voters. The high level of political literacy of Beginner Voters in Lhokseumawe City is not a motivating factor for citizens, it is evident that the level of participation of Beginner voters for abstentions in Lhokseumawe City was quite significant.

Keyword—Political Literacy, Beginner Voters

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu segment politik yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih pemimpin. Baik itu pemilu legeslatif, maupun pemilihan presiden (Pilpres), Gubernur, Bupati/Wali kota. Pemilihan Umum atau General election tidak hanya sekedar ciri dari suatu negara yang merdeka, akan tetapi juga berdaulat. Pemilu menandakan pula sebagai bentuk dipenuhinya hak azasi dari

masyarakat dalam menyelenggarakan kehidupan politiknya. Salah satu ciri negara yang demokrasi adalah adanya pergantian pemimpin secara teratur, hal ini sebagaimana yang digambarkan oleh [1], Pemilu juga sering kita maknai dengan pesta demokrasi, atau pesta rakyat. Lakab ini ini didasarkan pada dua alasan utama; pertama, bahwa dalam pemilu (terlebih lagi pemilu era moderen) rakyat dilibatkan secara langsung untuk menentukan calon pemimpin mereka, baik itu presiden, gubernur atau bupati/wali kota ataupun anggota legislatif. Dalam sistem ini rakyat dapat langsung mengenal sosok calon pemimpin yang akan dipilih melalui sistem voting suara di

TPS, dan kesempatan besar bagi masyarakat untuk memilih yang terbaik diantara yang baik. Selain itu, bagi para kandidat yang akan di pilih serta ikut dalam bursa pemilihan ini juga dapat menunjukkan kemampuan diri melalui berbagai pendekatan yang sah, sehingga dengan demikian akan memperoleh dukungan suara dari rakyat. kedua, disebut pesta demokrasi. Bahwa setiap warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan undang- undang memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Artinya, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih dengan tidak mengenal latar belakang agama, ras, suku/etnik maupun golongan tertentu. Di hadapan undang-undang, setiap rakyat memiliki hak yang sama. Dua alasan tersebut maka, lahirlah sebutan pemilu sebagai pesta demokrasi rakyat.

Pelaksanaan pemilihan umum yang jujur dan adil merupakan keinginan segenab masyarakat. Setiap kita menginginkan pelaksanaan pemilu yang kita maknai sebagai ajang pergantian pemimpin tersebut dapat terlaksana dengan baik, tanpa membawa suatu kerugian bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, membangun cita-cita itu tidaklah semudah membalik telapak tangan. Membangun pemilu yang jujur dan adil adalah sebuah upaya yang harus dilakukan secara terus menerus, terlebih lagi dalam budaya politik masyarakat Indonesia yang masih tergolong ke dalam budaya semi parochial. Kalau kita llihat dalam kasus pemilihan umum yang terjadi di Amerika dengan budaya politik masyarakatnya yang pastisipan, bahwa angka golput pun disana sangat rendah sekali, artinya kesadaran politik masyarakat sangat besar, dan kesadaran itu bukan hanya ditunjukkan dalam bentuk voting suara saat di TPS, tetapi keikutsertaan masyarakat Amerika dalam proses politik di negaranya sangatlah intens, jauh berbanding terbalik dengan apa yang sedang terjadi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Disinilah [2] menggambarkan bahwa Partisipasi politik masyarakat di negara maju telah mendorong terjadinya perubahan besar dalam negara tersebut, sehingga melahirkan sistem politik yang demokratis, yang pada akhirnya proses dari sistem politik tersebut mampu melahirkan kebijakan-kebijakan penting bagi pembangunan negaranya .

Keadaan ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di negara berkembang, seperti Indonesia, dan bahkan beberapa negara Asia lainnya. Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dengan ciri budaya politik masyarakat semi parokial. Masyarakat dengan budaya politik semi parochial, cenderung tidak ingin mengambil peran dalam suatu proses politik, seperti halnya pemilu, proses pengambilan keputusan dan lain-lain. Kalaupun peran itu ada, namun sangatlah terbatas pada segmen-segmen tertentu saja, dapat saja berupa hanya memberikan hak suara pada pemilu, dan itupun karena sifatnya wajib yang dipaksakan, bukan atas kesadaran. Sedangkan pada proses politik lainnya masyarakat sama sekali hampir tidak ikut terlibat di dalamnya.

Proses pemilu disebut baik apabila pemilu itu dilaksanakan secara jujur dan adil, serta mampu menghasilkan calon pemimpin yang berkualitas. Dalam literatur sejarah, hampir semua bangsa yang hebat dipimpin oleh pemimpin yang berkualitas. Hal inilah yang menjadi stimulus bagi semua

bangsa di dunia untuk terus berupaya melaksanakan proses pergantian pemimpin secara teratur melalui pemilu, dan melahirkan pemimpin yang berkualitas sebagai hasilnya. Pelaksanaan pemilu di Indonesia sejak tahun 1955 sampai dengan tahun 2014, merupakan waktu yang tergolong lama. Artinya, masyarakat seharusnya belajar dari pengalaman sebelumnya tentang bagaimana memilih pemimpin yang berkualitas melalui proses pemilu. Hal inilah yang tidak dimiliki oleh masyarakat Indonesia, artinya banyak masyarakat beranggapan bahwa pemilu itu tidak membawa pengaruh bagi kehidupan mereka, dan ini adalah bentuk pernyataan yang lahir dari masyarakat yang tidak sadar akan politik atau kita menyebutnya dengan melek politik

Melek politik dapat diartikan sebagai bentuk pengetahuan masyarakat tentang politik. Dan ini adalah fondasi yang paling penting dalam membangun suatu bangsa dan negara. Akan lebih baik jika suatu bangsa ini dibangun dan digerakkan oleh seluruh elemen masyarakat yang terlibat secara aktif, ketimbang hanya digerakkan oleh segelintir kelompok tertentu. Peran politik dari masyarakat ini sangat menentukan ke mana arah layar dan kemudi mesti digerakkan baik ketika laut sedang tenang, atau mungkin sedang bergejolak.

Melek politik (*political Literacy*) seharusnya memiliki sebuah pemahaman dalam dasar konsep politik, seperti konflik, perbuatan, keputusan, peraturan-peraturan, persetujuan/penolakan, dan pengetahuan- tentang dimanauntuk mendapatkan informasi yang mereka belum mengetahuinya (misalnya siapa yang didekati, organisasi mana yang harus dihubungi, dimana informasi faktual itu berada).

Jumlah pemilih kelompok pemula di Indonesia dari pemilu ke pemilu terus bertambah. Diperkirakan dalam setiap pemilihan umum, jumlah pemilih pemula mencapai 20-30 persen dari total jumlah pemilih dalam pemilu. Berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah pemilih pemula pada Pemilu 2014 mencapai 11 persen dari total 186 juta jiwa pemilih. Jumlah ini meningkat dibandingkan dua pemilu sebelumnya. Pada tahun 2004, jumlah pemilih pemula sekitar 27 juta dari 147 juta pemilih (18,4 persen). [3]. Sementara pada Pemilu 2009, ada sekitar 36 juta pemilih dari 171 juta pemilih (21 persen).

Besarnya potensi pemilih pemula ini haruslah mendapat perhatian khusus sehingga mereka tidak hanya dimanfaatkan oleh partai politik, salah satu pemanfaatan pemilih pemula adalah saat kampanye mereka kerap hanya dimobilisasi oleh parpol untuk mengikuti kampanye. Selain itu partai politik yang tujuannya hanya untuk menarik suara-suara sebanyak-banyaknya sering kali lupa untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada pemilih pemula sehingga mereka sering melupakan untuk mengingatkan kepada pemilih pemula untuk benar-benar peduli dengan pemilu. Selain rentan dimanfaatkan oleh partai politik, pemilih pemula juga rentan akan menjadi golput, karena kepedulian mereka terhadap pemilu masih sangat kecil. Hal ini dibuktikan dengan sebanyak 51.005 warga di kota tersebut tidak memilih (golput) dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota setempat yang telah

berlangsung pada 15 Februari 2017.

Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya yang berkelanjutan untuk membangun kesadaran masyarakat akan proses politik di lingkungannya. Salah satu upaya tersebut yaitu melalui riset tentang tingkat melek politik pemilih pemula. Karena dengan mengetahui tentang melek politik masyarakat, atau kesadaran politik masyarakat, maka akan dapat dipastikan pola pendekatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat dalam suatu wilayah.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari tingkat Melek Politik Pemilih pemula di kota Lhokseumawe. Dari hasil penelitian ini diharapkan akan muncul solusi-solusi terhadap terhadap permasalahan kemelekan politik yang terjadi selama ini di Kota Lhokseumawe. Dari studi akan dihasilkan suatu bahan kajian dan konsep-konsep yang menyangkut dengan tingkat Melek Politik pemilih pemula di kota Lhokseumawe., dimana sebagai objek dari studi ini digunakan pemilih pemula di kota Lhokseumawe. Luaran yang ditargetkan adalah publikasi ilmiah skala nasional dan publikasi dalam bentuk jurnal ilmiah terakreditasi.

1.2 Tinjauan Pustaka

Para siswa yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA), adalah mereka yang berumur 17 sampai dengan 21 tahun merupakan pemilih pemula yang baru akan pertama kali mengikuti pemilu. Jumlah dari pemilih pemula ini sangat banyak sehingga partai-partai politik seringkali memburu pemilih pemula sebagai sasaran utama kampanye politik. Menurut data Desk Pilkada Lhokseumawe warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 126.694 orang dengan jumlah pemilih pemula 4.300 orang.

Pemilih pemula atau mereka yang masih baru pertama sekali memiliki hak pilih, merupakan kalangan yang rentan tidak menggunakan hak pilihnya atau golput karena minimnya pengetahuan tentang cara menyalurkan hak pilih serta keterbatasan pengetahuan dan informasi yang didapat mengenai teknis pelaksanaan pemungutan suara. Data terakhir pada 2009, jumlah golongan putih (golput) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 mencapai 29,6 persen. Angka golongan putih (golput) atau warga yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2014 diduga lebih tinggi ketimbang pemilu-pemilu sebelumnya mencapai 34,02 persen.

1.2.1 Melek Politik (Polical Literacy)

Kesadaran politik dapat juga diartikan sebagai melek politik, untuk pembahasan melek politik, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan kesadaran dan apa yang dimaksud dengan politik. kesadaran adalah merupakan proses batin yang ditandai dengan pengertian, pemahaman, penghayatan yang mendalam terhadap sesuatu serta melaksanakannya dalam tingkah laku serta perbuatan yang didasari oleh pengertian, pemahaman, serta penghayatan terhadap sesuatu yang dilaksanakannya secara mendalam [4]. Melek politik adalah suatu kondisi psikologis siswa yang ditandai oleh adanya

pengertian, pemahaman, penghayatan dan pengamalan pola-pola hidup bangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pola hidup yang mencerminkan melek politik dapat dilihat dari ciri-ciri, watak dan kepribadian. Inilah yang digunakan untuk mengukur suatu kesadaran seorang warga negara yang melek politik.

Seseorang yang memiliki kesadaran politik adalah ia yang senantiasa mengikuti segala kegiatan pemerintah dan mengikuti segala kegiatan laporan mengenai aktivitas pemerintah melalui berbagai media. Sukadi dan Ani Hernawati dalam penelitiannya tentang melek politik, masing-masing menggunakan ciri-ciri, watak dan kepribadian dari generasi muda Indonesia yang terdapat dalam Inpres No. 12/ tahun 1982 tentang pendidikan politik bagi generasi muda sebagai tolak ukur melek politik. Ciri-ciri, watak dan kepribadian dari generasi muda yang melek politik adalah :

- a. Sadar akan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya terhadap kepentingan bangsa dan negara.
- b. Sadar dan taat pada hukum dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Memiliki disiplin pribadi, sosial dan nasional
- d. Memiliki tekad perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa depan yang disesuaikan dengan kemampuan obyektif bangsa saat ini.
- e. Mendukung sistem kehidupan nasional yang demokratis sesuai dengan Pancasila dan UUD'45
- f. Berpartisipasi secara aktif dan kreatif dalam kehidupan berbangsadan bernegara khususnya dalam usaha pembangunan nasional
- g. Aktif menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dengan kesadaran keanekaragaman suku bangsa ;
- h. Sadarakan perlunya pemeliharaan lingkungan hidup dan alam sekitar secara selaras, serasi dan seimbang;
- i. Mampu melakukan penilaian terhadap gagasan nilai serta ancaman yang bersumber dari ideologi lain diluar Pancasila dan UUD'45 atas dasar pada pikiran atau penalaran logis mengenai Pancasila dan UUD 1945

Melek politik sebagai unsur penting dalam melaksanakan sistem politik mengandung; persepsi, pengenalan, pengetahuan, ingatan, dan pengertian tentang politik, termasuk

konsekuensi-konsekuensinya; harapan,kepercayaan bahwa politik dapat memberikan suatu kegunaan serta memberikan perlindungan dan jaminannya dengan kepastian dan rasa keadilan; perasaan perlu dan butuh akan jasa politik, dan karena itu bersedia menghormatinya. Perasaan khawatir dan takut melanggar hukum, karena jika melanggar maka sanksi-sanksinya dapat dipaksakan; dan orientasi, perhatian, kesanggupan, kemauan baik, sikap, dan kesediaan serta keberanian mentaati konstitusi dalam hak maupun kewajibannya, karena kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum itu adalah kepentingan umum.

1.2.2 Indikator Melek Politik

Indikator melek politik sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif konkret tentang adanya taraf kesadaran konstitusi, maka seseorang yang mempunyai perhatian pada melek politik akan dapat mengetahui indikator-indikator melek politik antara lain; pengetahuan konstitusi dan sistem politik, artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku politik tertentu diatur oleh konstitusi; pemahaman politik, artinya seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan politik tertentu, terutama dari segi isinya; sikap politik artinya seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap perilaku politik; perilaku politik, artinya seseorang berperilaku sesuai dengan konstitusi dan sistem politik yang berlaku. Dengan demikian melek politik sama dengan kesadaran konstitusi atau hukum.

Pengetahuan politik tidak mempengaruhi secara positif maupun negatif pada melek politik masyarakat. Demikian pula dengan pengetahuan tentang isi konstitusi sukar sekali secara pasti menetapkan derajat melek politik masyarakat, karena teladan dari elit politik dan mekanisme politik turut menentukan pula. Oleh karena itu melek politik paling tidak dipengaruhi oleh; derajat pengetahuan dan pemahaman terhadap konsep politik; sikap instrumental timbul karena adanya pengetahuan tentang isi peraturan dan menonjolkan kepentingan pribadi, sedangkan sikap fundamental ditentukan dengan adanya pemahaman dan pengertian tentang isi peraturan tersebut; proses pelebagaan dan internalisasi; kepatuhan disebabkan karena sikap fundamental, misalnya tingkat usia, tingkat pendidikan, dan lama tinggal. [5].

Indikator melek politik tidak selalu saling berkorelasi, karena adakalanya orang yang mengerti politik, sikap dan perilakunya bertentangan dengan sistem politik yang berlaku, dia mengetahui dan memahami konstitusi yang berlaku namun dia melanggar, tidak mentaati atau memahani sistem politik tersebut. Namun, apabila ingin melihat tingkat melek politik seseorang yang tinggi, dapat dilihat dari ketaatan/kepatuhannya terhadap hukum. Apabila tingkat ketaatan/kepatuhan hukumnya tinggi, maka dapat dikatakan tingkat melek politiknya tinggi, sebaliknya apabila tingkat ketaatan/kepatuhan hukumnya rendah, maka tingkat melek politiknya rendah

1.2.3 Pemilih Pemula

Pemilih pemula adalah mereka yang telah berusia 17-21

tahun, telah memiliki hak suara dan tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) serta pertama kali mengikuti pemilihan umum, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden (UU Pilpres 2008: 7). Keberadaan pemilih pemula sering dikaitkan dengan keberhasilan suatu partai karena jika satu partai mendapatkan pemilih pemula dengan jumlah yang besar maka akan mendapatkan suara yang unggul dalam pemilu, karena jumlah pemilih pemula lebih dari setengah jumlah pemilih pemilu. Pemilih pemula di Indonesia masih memilih berdasarkan besar namanya satu partai, bukan karena visi dan misi partai tersebut. Sehingga disini diperlukan kecakapan bagi pemilih pemula agar dapat berpartisipasi dalam pemilu dengan cerdas. [6].

Pemilih pemula memiliki pengetahuan dan informasi yang lebih rendah dibandingkan dengan bukan yang dikategorikan pemilih pemula. Warga negara muda sering absen dari pemungutan suara dan pengetahuan politik. Sehingga diperlukan kampanye informasi politik bagi pemilih pemula. Pendidikan politik bagi pemilih pemula ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui cara formal melalui jalur persekolahan dan jalur non formal melalui pendidikan di masyarakat. Cara formal inilah yang harus dilaksanakan oleh PKn dengan membekali pengetahuan serta kecakapan. [7].

Pentingnya peranan pemilih pemula karena sebanyak 20% dari seluruh pemilih adalah pemula, dengan demikian jumlah pemilih pemula sangatlah besar, sehingga hak warga negara dalam menggunakan hak pilihnya janganlah sampai tidak berarti akibat dari kesalahan-kesalahan yang tidak diharapkan, misalnya jangan sampai sudah memiliki hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar atau juga masih banyak kesaalahan dalam menggunakan hak pilihnya.

Pemilih pemula yang terdiri atas pelajar, mahasiswa menjadi segmen yang memang unik, seringkali memunculkan dan tentu menjanjikan secara kuantitas. Disebut unik, sebab perilaku pemilih pemula dengan antusiasme yang tinggi, relatif lebih rasional, haus akan perubahan dan tipis akan sadar polusi pragmatisme.

Pemilih pemula memiliki antusiasme yang tinggi sementara keputusan pilihan yang bulat, sebenarnya menempatkan pemilih pemula sebagai swing voters yang sesungguhnya. Pilihan politik mereka belum dipengaruhi motivasi ideologis tertentu dan lebih didorong oleh konteks dinamika lingkungan politik lokal. Pemilih pemula mudah dipengaruhi kepentingan-kepentingan tertentu, terutama oleh orang terdekat seperti anggota keluarga, mulai dari orang tua hingga kerabat dan teman. Selain itu, media massa juga ikut berpengaruh terhadap pilihan pemilih pemula. Hal ini dapat berupa berita di televisi, spanduk, brosur, poster, dan lain-lain

Pemilih pemula khususnya remaja (berusia 17 tahun) mempunyai nilai kebudayaan yang santai bebas, dan cenderung pada hal-hal yang informal dan mencari kesenangan, oleh karena itu semua hal yang kurang menyenangkan akan dihindari. Disamping mencari kesenangan, kelompok sebaya adalah paling penting dalam kehidupan seorang remaja, sehingga bagi seorang remaja perlu mempunyai kelompok teman sendiri dalam pergaulan.

1.2.4 Upaya Mewujudkan Melek Politik Pemilih Pemula

Pemilu merupakan kesempatan yang baik bagi pemilih pemula untuk belajar tentang pelaksanaan demokrasi, khususnya menyalurkan hak pilih sesuai hati nurani kepada kontestan pemilu yang akan mengemban amanat pembangunan ke depan, karena selain sebagai pesta demokrasi lima tahunan, pemilu juga menjadi media memperkenalkan pemilih pemula mengenai proses demokrasi yang sesungguhnya.

Hal tersebut bisa terwujud dengan adanya pengetahuan yang dikuasai oleh siswa dapat memberikan peran serta dalam kehidupan demokrasi di berbagai lingkungan kehidupan baik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena kompetensi kewarganegaraan memberikan sumbangan sangat besar terhadap tingkat melek politik. kompetensi tersebut terutama berkaitan dengan pemahaman pemilih pemula tentang hak politik warga negara yang secara konstitusional telah diatur dalam UUD. Dengan demikian tingkat kemelekan politik sangat menentukan kualitas demokrasi, terutama Pemilu.

Dengan demikian diperlukan suatu upaya serius dari seluruh stake holder pemilu, khususnya kontestan yang bersaing dalam pemilu untuk mengeksplorasi metode-metode yang dapat meningkatkan partisipasi pemilih serta Peran parpol sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam memberikan pendidikan politik bagi warga Negara harus sangat maksimal, apalagi Negara sudah memberikan kompensasi kepada parpol untuk melakukan pendidikan politik bagi warga negara.

Untuk mewujudkan hal di atas diperlukan suatu bahan kajian dalam rangka mewujudkan pemilu yang berkualitas sehingga pemilih pemula memiliki melek politik yang baik sehingga akan dapat menjadi subjek yang kritis dalam menentukan pilihan politiknya sehingga mereka tidak dimanfaatkan secara gegabah oleh orang atau kelompok yang memiliki kepentingan tertentu.

1.2.5. Peran Perguruan Tinggi

Dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 3 Ayat (1) dinyatakan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada pasal-pasal berikutnya dinyatakan bahwa pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik. Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat. Dengan demikian tujuan pendidikan tinggi adalah untuk menghasilkan manusia terdidik yang memiliki kemampuan akademik dan/atau memperkaya

keahlian ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian, namun juga mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Perguruan Tinggi sebagai organisasi pendidikan, merupakan salah satu saluran perubahan sosial dan kebudayaan disamping organisasi politik, organisasi keagamaan, organisasi ekonomi dan organisasi hukum. Saluran-saluran tersebut berfungsi agar sesuatu perubahan dikenal, diterima, diakui serta dipergunakan oleh khalayak ramai dan mengalami proses pelembagaan. Bentuk perubahan sosial yang dilakukan perguruan tinggi merupakan perubahan yang dikehendaki (intended change) atau perubahan yang direncanakan (planned change) karena pencapaian perubahannya telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat.

Dalam hal ini perguruan tinggi dapat berperan sebagai agen perubahan (agent of change) yang berupaya membimbing atau mendampingi masyarakat untuk memperbaiki atau meningkatkan berbagai aspek yang mempengaruhi sistem sosial sosialnya ke arah yang lebih positif, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Dalam melaksanakan perubahan tersebut, agen perubahan langsung terkait dalam tekanan-tekanan untuk melakukan perubahan, bahkan mungkin menyiapkan pula perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan lainnya.

Sebagai agen perubahan, perguruan tinggi sekurang-kurangnya memiliki tiga peran, yaitu selaku sumber ilmu pengetahuan, kontributor, serta implementator. Sebagai sumber ilmu pengetahuan, di lingkungan perguruan tinggi terdapat manusia terdidik yang memiliki kemampuan akademik untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Peran sebagai kontributor, artinya perguruan tinggi menyumbangkan kemampuannya itu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Terakhir, peran selaku implementator, perguruan tinggi memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menerapkan langsung ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dalam kehidupan masyarakat.

Dalam mewujudkan melek politik pemilih pemula, peran-peran ini dapat dipertegas lagi, yaitu paling sedikit sebagai konseptor, inovator, evaluator, fasilitator, dan advokat. Peran sebagai konseptor terlihat dalam berbagai aktivitas ilmiah yang dihasilkan menunjukkan kemampuan dalam mengaitkan konsep, teori dengan kebutuhan saat ini maupun untuk kebutuhan masa yang akan datang. Dalam hal ini perguruan tinggi mampu melakukan berbagai kajian dan penelitian untuk menyusun apa yang diperlukan masyarakat saat ini dan di masa yang akan datang dalam menghadapi perkembangan demokrasi yang semakin hari semakin bagus tentunya.

Peran sebagai inovator menunjuk pada kemampuan perguruan tinggi untuk memunculkan gagasan-gagasan baru

yang diperlukan saat menyusun konsep yang diperlukan untuk kebutuhan masyarakat saat ini maupun saat yang akan datang dalam melakukan peningkatan melek politik. Gagasan-gagasan baru ini bisa muncul sebagai hasil kajian, penelitian dan pengembangan atau pendampingan kepada masyarakat. Peran sebagai evaluator tampak dalam kegiatan penelitian, terutama penelitian terapan yang dikaitkan dengan berbagai masalah sosial ataupun dampak pembangunan. Melalui kajian maupun penelitian ini perguruan tinggi dapat melakukan analisis dan evaluasi terhadap berbagai masalah sosial yang berkaitan dengan upaya-upaya yang pernah dilakukan untuk melakukan upaya peningkatan melek politik. Hasilnya dapat merupakan bahan masukan bagi perguruan tinggi itu sendiri maupun pihak-pihak terkait dalam menyusun berbagai program peningkatan melek politik pemilih pemula.

II. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di SMA Se Kota Lhokseumawe, dengan objek siswa/i yang sudah berusia 17 tahun/sudah memilih

2.2 Sifat Penelitian

Penelitian mengenai “Melek Politik (Political Literacy) Pemilih Pemula Dikota Lhokseumawe”, adalah merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan apa adanya secara tepat sifat – sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. [8].

2.3 Jenis data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dari responden maupun informan. Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertamanya melainkan bersumber dari data – data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan – bahan hukum.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik yaitu studi dokumen, wawancara (interview), observasi. Teknik studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian, baik penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris maupun penelitian ilmu hukum dengan aspek normative, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normative. Studi dokumen dilakukan atas bahan – bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Teknik Wawancara (interview) merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim di gunakan dalam penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris. Dalam kegiatan ilmiah wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang melainkan dilakukan dengan ranyaan – pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban – jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan.

2.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, maka data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri atas kata – kata yang tidak diolah menjadi angka – angka, karena data sukar di ukur dengan angka dan bersifat monografis atau berwujud kasus – kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam struktur klasifikasi, hubungan variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat non probabilitas dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara.

Penelitian ilmu hukum dan sosial dengan aspek empiris kualitatif, akan dipergunakan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Dalam model analisis ini, maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder akan diolah dan di analisis dengan cara menyusun data secara sistematis, di golongkan dalam pola dan tema, di kategorisasikan dan di klasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain di lakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis. Setelah di lakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan di sajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

Analisis data dilakukan dengan teknik deskripsi yaitu penggunaan uraian apa adanya terhadap suatu situasi dan kondisi tertentu, teknik interpretasi yaitu penggunaan penafsiran dalam ilmu hukum dalam hal ini penafsiran berdasarkan peraturan, teknik evaluasi yaitu penilaian secara komprehensif terhadap rumusan norma yang diteliti, dan teknik argumentasi yaitu terkait dengan teknik evaluasi merupakan penilaian yang harus didasarkan pada opini hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilu berkualitas yang menjadi salah satu prasyarat hadirnya kehidupan politik yang demokratis membutuhkan prakondisi adanya para pemilih yang literate (melek) secara politik, yang memungkinkan partisipasi pemilih bukan saja tinggi secara kuantitas, melainkan juga bermutu derajat kualitasnya. Pemilih yang literate secara politik adalah pemilih yang memahami, selain aspek-aspek pengetahuan teknis elektorasi, juga memahami aspek-aspek yang bersifat substantif dari isu-isu politik jangka panjang dan bersifat keseharian (daily governing) seperti isu policymaking, dampak suatu kebijakan politik terhadap kehidupan warga negara dll. Selain itu, pemilih yang melek politik diharapkan juga akan memiliki

integritas tinggi, kecerdasan dan daya kritis, serta rasionalitas dan tanggung jawab politik sebagai warga negara.

3.1 Gambaran Melek Politik Pemilih Pemula dalam memilih kepala daerah pada pemilu

Terkait dengan alasan kenapa pemilih pemula memilih kandidat dalam pemilihan kepala daerah, secara umum berdasarkan wawancara dengan responden menjawab mengandalkan faktor latar belakang si kandidat atau rekam jejak yang baik. Temuan tersebut menunjukkan kecenderungan positif karena memberi sebuah harapan untuk perbaikan kualitas pemilu di masa yang akan datang. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendrastomo dkk (2014) menunjuka bahwa beberapa hal yang mempengaruhi sosialisasi politik bagi pemilih pemula adalah kebiasaan, aktifitas sosial, lingkungan sosial, relasi sosial, media sosial. Pandangan pemilih terhadap partai politik melihat pada pentingnya identitas kepartaian partai politik sebagai dasar pertimbangan pemilihan, melemahnya kepercayaan terhadap partai politik menjadi sebuah indikasi bahwa partai tidak lagi memiliki kekuasaan mengikat orientasi politik masyarakat, strategi money politic dalam sosialisasi partai menjadi hal yang mempengaruhi pemilih pemula untuk tidak memilih partai tersebut. Dasar pertimbangan pemilih menentukan pilihan berdasarkan sosok kepala daerah disebabkan oleh beberapa hal yakni, ideologi, prestasi track record atau latar belakang kepala daerah, metode sosialisasi. Alasan pemilih lebih memilih sosok calon kepala daerah dari partai politik menempatkan rasionalitas pemilih pemula yang lebih melihat pada track record calon pemimpin dan melemahnya kepercayaan terhadap partai politik, dan tidak disepakati sistem money politic.

3.2 Pengaruh Informasi Pemilu Terhadap Partisipasi Dalam Pemilu

Berdasarkan serangkaian wawancara dengan narasumber, mendapatkan informasi bahwa pemilih pemula Kota Lhokseumawe sangat memahami Pemilu, namun hanya sebatas tata caranya bukan pada substansi nilai-nilai kepemiluan itu sendiri. Seharusnya mampu membangun pemahaman bahwa tujuan Pemilu bukan sekedar seremonial tetapi mewujudkan kesejahteraan bagi warga/masyarakat. Kondisi itu tidak ditemukan pada saat wawancara mendalam dengan narasumber Kana Fadillah (17) masyarakat di Ujong Blang. Dirinya tidak memahami akan hak-hak politik yang melekat di dirinya sendiri. Menurutnya yang diketahui sebatas memilih kepala daerah dan partai politik, kepala daerah, dan presiden. Jawaban sama dikatakan para responden lainnya terdiri dari; Yulia Mirna (18), Fitri (17), Alvia Rachmah (17), Rahmat Saputra (17), dan lain-lain. Mereka yakni "Pemilih pemula Kota Lhokseumawe" terjebak pada seremonial prosedur yang rutin dilakukan

pemerintah melalui Pemilu. Kelemahan pemahaman akan hak-hak politik mereka lebih menitikberatkan kepada kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang masih kurang intensif dilakukan oleh pemerintah maupun badan penyelenggara.

Berbicara partisipasi dalam Pemilu hampir bisa dikatakan seluruh pemilih pemula dikota Lhokseumawe pernah mengikuti pesta demokrasi melalui Pemilu (Pilkada, Pileg, dan Pilpres). Sangat minim menjawab dari seluruh responden menjawab tidak pernah. Sejalan dengan hasil Fokus Grup Diskusi yang dilakukan Komisi Independent Pemilihan Kota Lhokseumawe, hampir sangat kecil didapatkan Kota Lhokseumawe yang tidak berpartisipasi memberikan hak pemilih.

Mengatasi masalah tersebut sangat diperlukan pendidikan politik bagi mereka yang tidak peduli dengan keterlibatan di Pemilu. Faktanya berdasarkan KIP Lhokseumawe dengan pertanyaan peran partai politik dalam menyebarkan informasi dan pendidikan politik hanya mendapatkan sebesar 7%. Ini dapat disimpulkan bahwa peran-peran pendidikan politik yang seharusnya menjadi tanggung jawab partai kepada konstituennya tidak berjalan. Dengan demikian pengelolaan manajemen kepartaian kurang peduli terhadap urusan pendidikan politik bagi konstituennya.

Memberikan penyadaran pemilih pemula Kota Lhokseumawe meleak politik perlu dimaksimalkan keberadaan warung kopi di Lhokseumawe selain sosialisasi yang dilakukan KIP Lhokseumawe dan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Walaupun warga Lhokseumawe lebih berpengaruh penyebaran informasi kepemiluan dan pendidikan politik melalui penggunaan surat kabar, internet, dan televisi begitulah hasil temuan lapangan. Akan tetapi memiliki korelasi keberadaan warung kopi dan internet. Menurut sejumlah responden yang ditanyakan di warung kopi mengatakan mereka menyerap informasi dari internet ketika penyediaan akses internet diberikan oleh pemilih warung kopi.

IV. KESIMPULAN

- Tingkat melek politik (political literacy) Pemilih Pemula di Kota Lhokseumawe tergolong tinggi, dibuktikan dengan beberapa indikator, seperti kesadaran politik terhadap penentuan pilihan parpol/caleg dan kandidat yang bersaing dalam pemilu;
- Jenis media yang paling berpengaruh terhadap peningkatan political literacy adalah surat kabar, internet dan televisi, sedangkan parpol dan tim kampanye kandidat belum mampu menjalankan peran dengan baik dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya untuk pemilih pemula;
- Tingginya tingkat melek politik Pemilih Pemula di Kota Lhokseumawe tidak menjadi faktor pendorong bagi

peningkatan partisipasi politik warga, terbukti tingkat partisipasi pemilih Pemula untuk golput di Kota Lhokseumawe cukup signifikan

REFERENSI

- [1] Sumantri, Endang. (2003). *Pendidikan Politik*. Jakarta : Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- [2] Branson, M. S (1999). *The Role of Civic Education*. Calabasas. CCE
- [3] M, Asfar. (2006). *Pemilu dan Perilaku Pemilih (1995-2004)*. Jakarta. Pustaka Eureka
- [4] Gaffar. A. (2006). *Politik Indonesia :Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta :PustakaPelajar.
- [5] Kantaprawira, R. (2004). *Sistem Politik Indonesia :Suatu Model Pengantar*. Bandung : SinarBaruAlgesindo
- [6] Ruslan, U. AM. (2000). *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslim*. Solo : Era Intermedia
- [7] Zamroni. 2001. *Pendidikan untuk Demokrasi*. Yogyakarta: Biograf Publishing
- [8] Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* Bandung : Alfabeta